



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(BIDANG KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BNP2TKI
BADAN POM, BKKBN, DJSN, ASKES, DAN JAMSOSTEK)**

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: DPRD Kota Mojokerto
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 8 Maret 2011
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: Konsultasi terkait kewenangan DPRD terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan pihak ketiga (PT. Askes)
Ketua Rapat	: Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota	: 22 orang anggota dari 33 Pokja Kesehatan Anggota Komisi IX DPR RI, 1 orang izin

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan DPRD Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dimulai pukul 14.00 WIB, setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. DPRD Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur menyampaikan paparan sebagai berikut:
 - a. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Mojokerto pelaksanaannya akan diserahkan kepada PT. Askes, namun anggaran kesehatan bagi pelayanan warga miskin dan keluarga miskin Kota Mojokerto belum mencukupi.
 - b. Adanya dugaan kebocoran dan manipulasi anggaran kesehatan Kota Mojokerto hal ini disebabkan laporan yang berbeda atau fiktif sehingga telah terjadi kebohongan publik.
 - c. Program pelaksanaan data base warga miskin dan keluarga miskin yang valid masih belum terlaksana dengan baik sehingga masih banyak warga yang belum tercover jaminan kesehatannya.

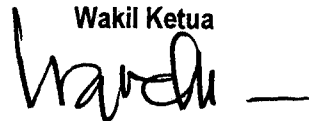
2. Komisi IX DPR RI meminta DPRD Kota Mojokerto untuk melakukan fungsi pengawasan dan anggaran terhadap pelaksanaan anggaran kesehatan dengan melakukan verifikasi dan pengolahan data sehingga pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Kota Mojokerto dapat terlaksana dengan baik.
3. Komisi IX DPR RI meminta DPRD Kota Mojokerto melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan sehingga database yang valid mengenai warga miskin dan masyarakat miskin yang layak mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah tepat sasaran.
4. Melalui DPRD Kota Mojokerto Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah Kota Mojokerto dalam pembangunan bidang kesehatan agar merubah pola hidup masyarakat Kota Mojokerto melalui peningkatan program promotif dan preventif.
5. Komisi IX DPR RI meminta DPRD Kota Mojokerto menerbitkan Peraturan Daerah merujuk UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
6. Dalam rangka percepatan MDGs tahun 2015, Komisi IX DPR RI menginformasikan terkait Surat Edaran Menteri Kesehatan RI No.TU/Menkes/E/391/II/2011 tentang Jaminan Persalinan. Program Jaminan Persalinan ini diperuntukan bagi seluruh persalinan penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kota Mojokerto yang manajemen pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Askes.
2. Komisi IX DPR RI mendorong DPRD Kota Mojokerto untuk meningkatkan fungsi pengawasan termasuk data kepesertaan dan fungsi anggaran dalam pelaksanaan program JAMKESDA.
3. Komisi IX DPR RI meminta kepada DPRD Kota Mojokerto untuk mendorong Pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan program promotif dan preventif dalam pembangunan dibidang kesehatan.
4. Komisi IX DPR RI mendorong DPRD dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kota dan PT. Askes, untuk mengkaji peluang menerbitkan Perda pembiayaan kesehatan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

Rapat diakhiri pukul 15.30 WIB

Jakarta, 8 Maret 2011
Pimpinan Komisi IX DPR RI
Wakil Ketua



Drs.H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ